



LAPORAN KEUANGAN
SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2024



SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAIHERU AMBON

JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENNA KM. 16 WAIHERU AMBON

TELEPON (0911) 361111 (*HUNTING*), FAKSIMILE (0911) 361111

WEB. supmwaiheru-kkp.sch.id SURAT ELEKTRONIK supmwaiheruambon@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru Ambon adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Riset Dan SumberDaya Manusia (BRSDM) KP yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru Ambon mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru Ambon. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Ambon, Juli 2024
Kepala,

Abdul As'ad Semahu, S.St.Pi, M.S.T.Pi



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	6
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	7
1.LAPORAN REALISASI ANGGARAN	7
2.NERACA	7
3.LAPORAN OPERASIONAL	7
4.LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	8
5.CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	8
Penjelasan Umum	13
Dasar Hukum	13
Profil Dan Kebijakan Teknis Satuan Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon	14
<i>DASAR HUKUM ENTITAS DAN RENCANA STRATEGIS</i>	14
VISI	15
MISI	15
STRUKTUR ORGANISASI	17
Standar Kurikulum	18
Profile Program Keahlian	18
Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	20
Basis Akuntansi	21
DASAR PENGUKURAN	21
Kebijakan Akuntansi	22
Pendapatan-LRA	22
Pendapatan -LO	22
Belanja	23
Beban	23
Aset	23
Penyusutan Aset Tetap	25
Piutang Jangka Panjang	26
Aset Lainnya	26
Kewajiban	27
Ekuitas	28
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	29
Pendapatan	32
Belanja	33

Belanja Pegawai.....	35
Belanja Barang	37
Belanja penanganan Pandemi Covid-19.....	38
Belanja Modal.....	38
Belanja Modal Tanah	39
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39
Belanja Modal gedung dan Bangunan	40
Belanja Modal Jalan,jembatan,irigasi dan Jaringan	40
Belanja Modal Lainnya	41
Belanja Bantuan Sosial.....	41
PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	42
ASET LANCAR	42
Kas DiBendahara Pengeluaran	42
Kas DiBendahara Penerimaan	42
Kas Lainnya Dan Setara Kas.....	43
Piutang PNBP	45
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	45
Bagian Lancar tagihan penjualan Angsuran.....	46
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar	47
Belanja Dibayar Dimuka.....	47
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	48
Persediaan.....	48
Aset Tetap	49
Tanah	50
Peralatan Dan Mesin	51
Gedung Dan Bangunan.....	51
Jalan Dan Jembatan	52
Irigasi.....	52
Jaringan	53
Aset Tetap Lainnya	53
Konstruksi Dalam Pengerjaan	54
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	54
Piutang Jangka Panjang.....	54
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan ganti Rugi (TP/TGR)...	55
Tagihan Penjualan Angsuran.....	55
Aset Lainnya.....	57

Aset Tak Berwujud	57
Aset lain-lain	58
Akumulasi Penyusutan/amortisasi aset lainnya	58
Kewajiban Jangka Pendek	59
Uang Muka Dari KPPN	59
Utang Kepada pihak Ketiga	59
Utang yang Belum Ditagihkan.....	60
Pendapatan diterima dimuka	60
Beban yang masih harus dibayar	60
EKUITAS	61
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL.....	62
Pendapatan Negara Bukan Pajak	62
Beban Pegawai.....	63
Beban Persediaan.....	64
Beban Barang Dan Jasa.....	64
Beban Pemeliharaan	66
Beban Perjalanan Dinas	67
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	67
Beban Bantuan Sosial.....	68
Beban Penyusutan Dan Amortisasi.....	68
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	69
KEGIATAN NON OPERASIONAL	70
POS LUAR BIASA	71
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	72
EKUITAS AWAL.....	72
SURPLUS/DEFISIT LO	72
PENYESUAIAN NILAI ASET.....	72
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	72
SELISIH REVALUASI ASET TETAP.....	72
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI.....	72
KOREKSI LAIN-LAIN	73
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS.....	73
EKUITAS AKHIR	75
PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA	76
PENGELOLA ANGGARAN	76



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAIHERU AMBON
JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENNA KM. 16 WAIHERU AMBON
TELEPON (0911) 361111 (*HUNTING*), FAKSIMILE (0911) 361111
WEB. Supmwaiheru-kkp.sch.id SURAT ELEKTRONIK supmwaiheruambon@yahoo.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

Ambon, Juli 2024
Kepala,

Abdul A. Usamah, S.St.Pi, M.S.T.Pi
NIP. 19820208 200604 1 004

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon Semester I Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan Keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1.LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 30 Juni 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp169.577.833 atau mencapai 36 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp475.000.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp8.960.548.040 atau mencapai 62 persen dari alokasi anggaran semula Rp14.398.554.040

2.NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2024. Nilai Aset per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp44.207.106.668 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp216.537.480, Aset Tetap (neto) sebesar Rp43.551.574.314, dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp438.994.874

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp602.861.727 dan Rp43.604.244.941.

3.LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp165.716.094, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp10.459.979.102 sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp10.294.263.008), Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non lancar (Rp116,181,532),Pendapatan pelepasan aset non lancar Rp0,Beban pelepasan Aset Non Lancar Rp116.181.532,Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional lainnya Rp0,Pendapatan dari Kegiatan non Operasional lainnya Rp0 ,Jumlah Surplus/deficit dari Kegiatan Non Operasional (Rp116,181,532) Surplus/Defisit sebelum pos Luar Biasa masing-masing sebesar (Rp10.410.444.540) sehingga Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp10.410.444.540)

4.LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal adalah sebesar Rp45.690.183.583 dikurangi Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp10.410.444540) ditambah dengan koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas senilai (Rp462,851,009), Koreksi Nilai Aset non Revaluasi (Rp462.914.010), Lain-lain Rp63,001, Transaksi Antar Entitas sebesar Rp8.787.356.907, Kenaikan/Penurunan Entitas (Rp2,085.938.642) sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal adalah senilai Rp43.604.204,573.

5.CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan

SAKTI (Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi)

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) PNBPN tersaji senilai Rp.475.000.000,00 yang Bersumber dari Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Budidaya

Rp111.160.000,00, Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang lainnya Rp0, Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya Rp.0, Pendapatan Sewa tanah, Gedung dan Bangunan Rp.36,069,101,00, Pendapatan penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Rp1.736.000,00, Pendapatan Biaya Pendidikan Rp9.400.00,00, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Rp7.432.732,00

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAIHERU AMBON
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 30 JUNI 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	JUNI 2024				JUNI 2023
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DIATAS (DI BAWAH)	%	Realisasi
Pendapatan Negara Dan Hibah	B.1	-				
Pendapatan Negara Bukan Pajak	B.1	475,000,000	169,577,833	(305,422,167)	36	682,861,101
Jumlah Pendapatan Dan Hibah						
Belanja	B.2	-	-			
Belanja Pegawai	B.3	6,392,174,000	5,191,362,477	(5,438,005,960)	62	8,027,025,530
Belanja Barang	B.4	7,671,086,000	3,769,185,563	(3,901,900,437)	81	3,998,286,166
Belanja Modal	B.5	335,294,000	0	(335,294,000)	0	209,761,000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-			
Jumlah Belanja		14,398,554,000	8,960,548,040	(5,438,005,960)	62	10,721,723,470

II. NERACA

SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAIHERU AMBON
NERACA
PER 30 JUNI 2024 DAN 30 JUNI 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)	
				5	6
1	2	3	4	Jumlah	%
ASET	C.				
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.9	72,000,000	0	72,000,000	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan					
Kas Lainnya dan Setara Kas		7,454,167	0	7,454,167	0,00
Piutang Bukan Pajak		8,738,361	12,600,100	(9,029,107)	(71,66)
Penyisihan piutang tidak tertagih-Piutang bukan Pajak		0	(63,001)	63,001	(100)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.1.0	8,738,361	12,537,099	(8,966,106)	(71,52)
Persediaan	C.1.0	128,344,952	136,000,884	(7,655,932)	5,63
Persediaan Yang Belum diregister					
JUMLAH ASET LANCAR	C.11	216,537,480	148,537,983	62,832,129	42.30
ASET TETAP	C.13				
Tanah	C.14	13,703,592,500	13,703,592,500	0	0.00
Peralatan Dan Mesin		17,530,415,832	25,999,922,430	(8,469,506,598)	(32.58)
Gedung Dan Bangunan		34,532,254,037	34,969,785,813	(617,531,776)	(1.77)
Jalan, irigasi dan Jaringan		3,048,672,453	3,048,672,453	0	0.00
Aset tetap lainnya	C.15	1,548,798,822	1,604,132,822	(55,334,000)	(3.45)
AKUMULASI PENYUSUTAN		(26,632,159,330)	(33,773,717,818)	7,141,558,488	(21.15)
JUMLAH ASET TETAP		43,551,574,374	45,552,388,200	(2,000,813,886)	(4.39)
ASET LAINNYA	C.16				
Aset lain-lain		8,524,840,598	0	8,524,840,598	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA		(8,085,845,724)	0	(8,055,905,579)	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	C.17	438,994,874	0	468,935,019)	
JUMLAH ASET		44,207,106,668	45,700,926,183	(1,486,986,883)	(3.28)
KEWAJIBAN	C.18				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Kepada Pihak Ketiga		305,775,589	10,742,600	295,032,989	2.746.38
Utang yang Belum ditagihkan		217,631,971	0	217,631,971	0.00
Uang Muka Dari KPPN		72,000,000	0	72,000,000	0.00
Utang Jangka Pendek Lainnya		7,454,167	0	7,454,167	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		602,861,727	10,742,600	592,119,127	5,511,88
JUMLAH KEWAJIBAN		602,861,727	10,742,600	592,119,127	5,511,88
EKUITAS					
EKUITAS	C.19				
Ekuitas		43,604,244,941	45,690,183,583	(2,091,106,010)	(4.58)
JUMLAH EKUITAS		43,604,244,941	45,690,183,583	(2,091,106,010)	(4.58)
JUMLAH EKUITAS		43,604,244,941	45,690,183,583	(2,091,106,010)	(4.58)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		44,207,106,668	45,700,926,183	(1,498,986,883)	(3.28)

III. LAPORAN OPERASIONAL

SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAIHERU AMBON
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 30 JUNI 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN PERPAJAKAN					
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	165,716,094	332,949,860	(167,233,766)	(50.228)
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		165,716,094	332,949,860	(167,233,766)	(50.228)
JUMLAH PENDAPATAN		165,716,094	332,949,860	(167,233,766)	(50.228)
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai	D.2	5,470,078,166	4,251,738,021	1,218,340,145	28.655
Beban Persediaan	D.3	220,195,527	480,817,698	(260,622,171)	(54.204)
Beban Barang Dan Jasa	D.4	2,520,073,663	2,823,540,102	(303,466,439)	(10.748)
Beban Pemeliharaan	D.5	711,130,876	966,665,750	(273,250,474)	(26.435)
Beban Perjalanan Dinas	D.6	555,777,400	227,898,500	327,878,900	143.871
Beban Barang Untuk diserahkan kepada Masyarakat	D.7	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	D.8	0	0	0	
Beban Penyusutan Dan Amortisasi	D.9	982,723,470	1,033,350,084	(50,626,614)	(4.899)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10		0		
JUMLAH BEBAN		10,459,979,102	9,784,010,155	675,968,947	6,909
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	D.11	(10,294,263,008)	(9,451,060,295)	(843.202.713)	8.922
KEGIATAN NON OPERASIONAL		0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR		(116,181,532)	(66,945,809)	49,235,723	73,546
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.12	0	0	0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.13				
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non lancar	D.14				
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang					
PENDAPATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	D.15				
PENERIMAAN KEMBALI BELANJA PEGAWAI TA YANG LALU	D.16				
PENDAPATAN PEROLEHAN ASET LAINNYA	D.17				
BEBAN PENYESUAIAN NILAI PERSEDIAAN	D.18				
BEBAN PERSEDIAAN USANG/RUSAK					
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			191,123,506	(196,290,874))	(102.704)
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			191,123,506	(196,290,874))	(102.704)
Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(116,181,532)	124,177,697	(245,526,597)	(197.722)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	D.19	(10,410,444,540)	(9,326,882,598)	(1.088.729.310)	11,673
POS LUAR BIASA		0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT LO		(10,410,444,540)	(9,326,882,598)	(1.088.729.310)	11,673

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAIHERU AMBON
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 30 JUNI 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	JUNI 2024	JUNI 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	E.1	45,690,183,583	47,191,381,538	(1,501,197,955)	(3.18)
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(10,415,611,908)	(9,326,882,598)	(1.088.729.310)	11.67
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(462,,851,009)	(100,940,084)	(361,910,925)	358.54
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4	0	0	0	-
PENYESUAIAN NILAI PERSEDIAAN	E.5				
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.6				
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI					
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI PERSEDIAAN /ASET TETAP /ASET LAINNYA	E.7				
SELISIH REVALUASI ASET TETAP					
REVALUASI ASET TETAP	E.8				
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.9				
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.10	(462,914,010)	(100,940,084)	(361,973,926)	358.6
LAIN-LAIN	E.11	63,001	0	63,001	0
EKUITAS TRANSAKSI LAINNYA	E.12				
PENGEMBALIAN PENDAPATAN BLU TA YANG LALU	E.13				
SAL SELISIH KUR BELUM TEREALISASI	E.14				
PENYESUAIAN SAL BLU	E.15				
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		8,787,356,907	7,694,971,394	1,092,385,513	14.2
DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	E.16				
DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	E.17				
TRANSFER KELUAR KAS BLU DARI BLU LAIN	E.18				
TRANSFER MASUK KAS BLU DARI BLU LAIN	E.19				
PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG					
KOREKSI LAIN-LAIN HIBAH MASUK KELUAR	E.20				
TRANSAKSI PENGELOLAAN INVESTASI BA BUN PADA BLU	E.21				
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.22	(2,085,938,642)	(1,732,851,288)	(358,254,722)	20.67
EKUITAS AKHIR		43,604,244,941	45,458,530,250	(1,859,452,677)	(4.09)

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**A. PENJELASAN UMUM****A.1. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor **PER-42/PB/2015** tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor **222/PMK.05/2016** tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Satuan Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon

DASAR HUKUM

ENTITAS DAN

RENCANA

STRATEGIS

Satuan Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat dibidang Pendidikan Perikanan yang bertanggung jawab kepada Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon diresmikan pada tanggal 13 Januari 1986 oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Achmad Affandi dengan nama SPP (Sekolah Pertanian Pembanguan) Negeri Waiheru dan diubah menjadi Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon melalui Keputusan Menteri Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendidikan formal menengah kejuruan dibidang perikanan selama 3 (tiga) tahun, bagi lulusan sekolah menengah tingkat pertama, sesuai perundang-undangan yang berlaku, menghasilkan tenaga teknis menengah perikanan yang mahir dan memiliki jiwa wiraswasta, memiliki tanggung jawab sosial dan disiplin nasional dan berperan serta dalam melaksanakan pembangunan perikanan di wilayahnya khususnya di Provinsi Maluku.

Satuan Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM-KP), Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok " Melaksanakan Pendidikan Menengah Kejuruan Bidang Perikanan ".

Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan guna menghasilkan tenaga teknis menengah perikanan yang mahir dan memiliki jiwa wiraswasta, tanggung jawab sosial dan disiplin nasional serta mampu berperan serta dalam pembangunan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas di atas, Satuan Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon Menyelenggarakan fungsi :

- Pemberian Pembelajaran Pendidikan kepada siswa dibidang perikanan.
- Pelaksanaan kegiatan ko-kurikuler dan ekstra kurikuler
- Pelaksanaan bimbingan konseling bagi siswa
- Pelaksanaan kegiatan ketrampilan perikanan terjual bagi masyarakat
- Pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam pembangunan perikanan

- Pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan
- Pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan dunia industri usaha, orang tua siswa dan masyarakat.
- Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga sekolah

A.2.1 VISI

Visi adalah cara pandang jarak jauh kedepan tentang kemana organisasi akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Sesuai dengan Visi Badan Riset SDM KP dan Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, maka Visi Satuan Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon adalah **"Mewujudkan Lulusan Terdidik dan Kompeten, Berjiwa Wirausaha, Berdaya saing, demi Kesejahteraan Masyarakat"**

Dengan Visi ini diharapkan dapat terlaksananya penyelenggaraan pendidikan yang menghasilkan sumberdaya manusia perikanan yang kompeten dan berjiwa wirausaha dengan kepribadian kecintaan terhadap profesi perikanan turut berperan serta dalam pembangunan kelautan dan perikanan.

A.2.2 MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, Satuan Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon memiliki misi yang jelas untuk mencapai tujuan organisasi dengan baik. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan organisasi, sehingga dapat terus eksis dan mengikuti perubahan zaman. Bertolak dari misi, ditetapkan sasaran utama yang harus dicapai oleh organisasi, sehingga tidak ada keraguan bagi segenap komponen organisasi.

Misi Satuan Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon adalah: **"Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Terdidik untuk Mendukung Peningkatan Daya saing dan Menjadi Penjurur Pendidikan Kelautan dan Perikanan Di wilayah Kerjanya"**.

A.2.3 Tujuan & Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Satuan Kerja Sekolah Usaha Perikanan Waiheru Ambon telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Adapun karakteristik perumusan tujuan adalah antara lain:

- (1) waktu pencapaiannya dalam jangka menengah

- (2) dilakukan secara jelas.
- (3) mempertimbangkan faktor internal dan eksternal.
- (4) terkait dengan misi.
- (5) mempertimbangkan nilai yang dianut organisasi
- (6) mempertimbangkan critical success factors (CSF).
- (7) tidak bertentangan dengan visi.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Berdasarkan Karakteristik di atas, maka tujuan yang ingin dicapai Satuan Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebelumnya adalah :

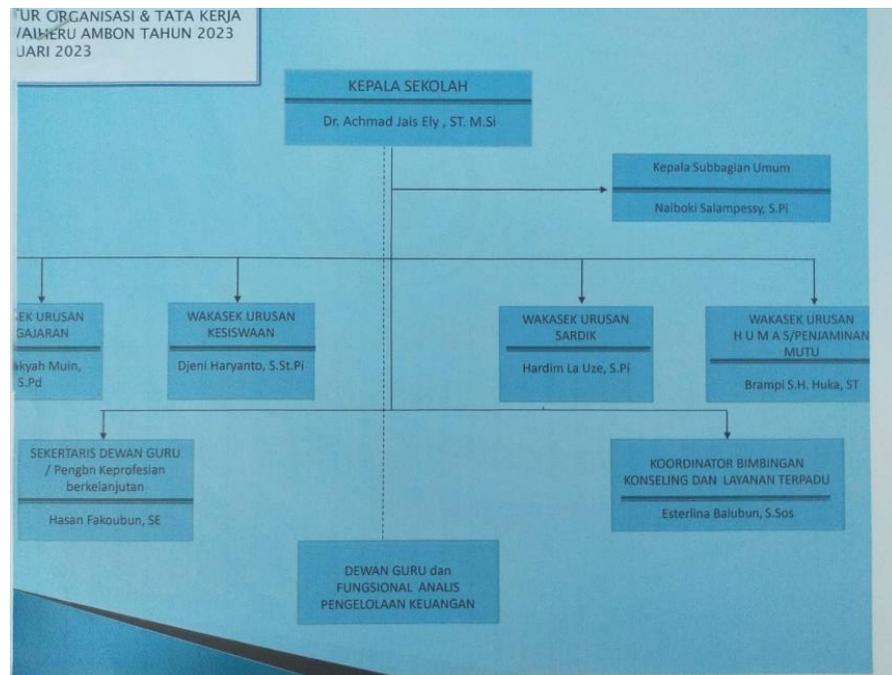
- a. Menghasilkan tenaga Teknisi Perikanan Tingkat Menengah yang bermoral, Profesional dan berjiwa bahari serta berwawasan lingkungan.
- b. Meningkatkan ketrampilan Profesionalisme tenaga pendidik dalam rangka peningkatan Mutu Pendidikan sesuai kurikulum standar Internasional.
- c. Meningkatkan dan menyiapkan SDM melalui pelatihan teknis Kelautan dan Perikanan yang mampu dan bertanggungjawab dalam melakukan atau melaksanakan tugas dan fungsinya.
- d. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan siswa.
- e. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pendidikan sesuai standar Internasional.

Sedangkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai Satuan Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon dalam penyelenggaraan Pendidikan adalah :

- a. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan SDM KP yang kompeten.
- b. Meningkatkan hasil pengembangan Riset dan SDM yang mendukung tata kelola pemanfaatan negara dari sektor KP.
- c. Terselenggaranya program Riset dan SDM KP yang mendukung tata kelola Tersedianya kebijakan pemanfaatan SDM KP yang berkeadilan dan daya saing.

- d. Terselenggaranya pengendalian dan monitoring pelaksanaan program SDMP KP melalui kegiatan pendidikan kelautan dan perikanan.
- e. Terwujudnya aparatur sipil negara bidang pendidikan KP yang kompeten, profesional dan berkepribadian.
- f. Tersedianya manajemen pengetahuan bidang pendidikan KP yang handal dan mudah diakses.
- g. Terwujudnya pranata kelembagaan birokrasi bidang pendidikan KP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
- h. Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan Akuntabel

A.2.4 Struktur Organisasi



Jumlah pegawai pada satuan kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru Ambon adalah berjumlah 78 pegawai dengan sebaran :

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Guru	23
2	Instruktur	2
3	Arsiparis	1
4	APK APBN	3
5	Jabatan Fungsional Umum	26
6	Satpam	4
7	Pramusaji	3
8	Driver	1
9	Pelaksana Administrasi Dan Teknis	12
	JUMLAH	75

A.2.5 Standar Kurikulum

Pendidikan difokuskan kepada penguasaan ketrampilan sehingga memiliki kompetensi di bidang kelautan dan perikanan serta pembinaan kedisiplinan tinggi dan pembentukan karakter peserta didik. Lulusan Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon Waiheru Ambon, selain memperoleh Ijazah SUPM mereka juga mendapatkan Sertifikat profesi sesuai dengan program keahlian, seperti ; Ahli Nautika Kapal Penangkapan Ikan (ANKAPIN)-II, Sertifikasi Hazard Analisis Critical Control Point (HACCP) Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Para lulusan diharapkan menjadi tenaga profesional yang mampu menciptakan lapangan kerja bagi dirinya maupun orang lain atau bekerja sebagai tenaga teknis profesional pada perusahaan perikanan, di bidang pemerintah lembaga riset, lembaga pendidikan dan pelatihan kelautan dan perikanan.

A.2.6 Profile Program Keahlian

Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon Menyelenggarakan 3 program keahlian, yaitu :

1. Nautika Kapal Penangkap Ikan (NKPI)

Program keahlian ini memberikan kesempatan untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan di bidang Teknik Penangkapan Ikan dan Navigasi Kapal Penangkap Ikan. Para siswa didorong menerapkan teknik penangkapan ikan modern yang ramah lingkungan demi menjaga kelestarian sumberdaya perikanan. Lulusan program studi ini mampu melayarkan dan mengoperasikan kapal untuk usaha penangkapan ikan

2. Agribisnis Perikanan Air payau dan Laut (APAPL)

Program keahlian ini memberikan kesempatan untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan di bidang teknik dan pengembangan budidaya ikan maupun komoditas perikanan lain yang bernilai ekonomis. Para siswa didorong menerapkan sistem dan teknik budidaya ikan yang baik guna menjaga kelestarian lingkungan sumberdaya Perikanan. Lulusan program studi ini mampu melaksanakan pembenihan ikan dan komoditas perikanan lainnya dalam kegiatan budidaya perikanan air tawar, air payau dan air laut.

3. Agribisnis Dan Pengolahan Hasil Perikanan (APHP)

- Program keahlian ini memberikan kesempatan untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan dibidang teknik pengolahan dan pengawasan mutu olahan hasil perikanan.

- Para siswa didorong menerapkan sistem dan teknik pengolahan tradisional dan modern guna menghasilkan produk bermutu dan higienis sesuai dengan ketentuan HACCP. Para lulusan mampu melaksanakan kegiatan usaha pengolahan dan melakukan pengawasan mutu hasil perikanan

***PENDEKATAN
PENYUSUNAN
LAPORAN
KEUANGAN***

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan 30 Juni Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satuan Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru Ambon. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

SAKTI terdiri atas SAKTI online dan SAKTI offline, yang menggunakan sistem single entry point, single database, dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, unaudited dan audited.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SATKER dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut:

Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu :

modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen Supplier dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran.

Proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan

BASIS***AKUNTANSI*****A.4 Basis Akuntansi**

SUPM Waiheru Ambon menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

DASAR***PENGUKURAN*****A.5. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan SUPM Waiheru Ambon dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

**KEBIJAKAN
AKUNTANSI****A.6. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Desember Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari SUPM Waiheru Ambon. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan SUPM Waiheru Ambon adalah sebagai berikut:

**PENDAPATAN-
LRA****(1) Pendapatan-LRA**

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

PENDAPATAN LO (2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada SUPM Waiheru Ambon adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Uang Pendidikan diakui setelah Penyetoran dilaksanakan atau Bulan Bersangkutan berakhir.
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan TUSI diakui sebagai pendapatan penatausahaan Barang Milik Negara yang digunakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

BELANJA

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

BEBAN

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

ASET

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

ASET LANCAR

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,
 - c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net

realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

ASET TETAP

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

PENYUSUTAN

ASET TETAP

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

PIUTANG JANGKA PANJANG

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

ASET LAINNYA

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud.

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

KEWAJIBAN

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada

Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal

pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

EKUITAS

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

REALISASI**ANGGARAN****RP8.960.548.040****B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menjadi wabah yang menyebar luas ke seluruh dunia. Bermula dari Wuhan, ibukota Provinsi Hubei. Secara tak terduga, COVID-19 bergerak sangat cepat ke semua belahan dunia termasuk Indonesia dan tidak dapat dideteksi dengan mudah. Wabah COVID-19 memerlukan upaya penanggulangan dan pencegahan penyebaran, yang pada akhirnya menimbulkan dampak sosial yang sangat besar. Rumah sakit pemerintah dan swasta disiagakan bahkan dibangun rumah sakit khusus untuk penanganan COVID 19 ini. Kegiatan sterilisasi dilakukan secara masif dengan penyemprotan disinfektan pada fasilitas-fasilitas umum. Perilaku individu juga mendorong gerakan cuci tangan, physical distancing dan memakai masker sebagai pelindung diri agar tidak tersebar dan menyebarkan COVID-19 ini. Dampak pandemi COVID-19 terasa pada seluruh aspek kehidupan, tak terkecuali perekonomian. Dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor keuangan khususnya APBN juga tidak dapat dihindari oleh Pemerintah. Beberapa strategi maupun kebijakan telah diputuskan pemerintah sebagai upaya mengurangi dampak pandemi. Sebagai langkah awal, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, untuk menetapkan berbagai kebijakan fiskal dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Berbagai kebijakan tersebut antara lain peningkatan belanja fasilitas dan pelayanan kesehatan, pemberian bantuan sosial, dan stimulus bagi dunia usaha. Selanjutnya, berbagai Kementerian Negara/Lembaga (K/L) menindaklanjutinya dengan memangkas anggaran untuk dialihkan ke anggaran penanganan pandemi COVID-19. Kebijakan pemerintah tersebut tentunya akan berdampak terhadap laporan keuangan.

Satuan Kerja SUPM Waiheru Ambon memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp14.398.554.000 . DIPA Awal Satuan Kerja SUPM Waiheru Ambon telah melakukan revisi sebanyak 4 (Empat) kali

Adapun Revisi DIPA tersebut adalah sebagai berikut:

NO	NOMOR REVISI DIPA	TANGGAL REVISI DIPA	KETERANGAN
1	SP DIPA-032.12.2.427618/2024	19 Februari 2024	POK I
2	SP DIPA-032.12.2.427618/2024	20 Februari 2024	Hal III TW I
3	SP DIPA-032.12.2.427618/2024	16 April2024	Hal III TW 2 dan POK
4	SP DIPA-032.12.2.427618/2024	30 April 2024	Buka Blokir
5	SP DIPA-032.12.2.427618/2024	29 Mei 2024	Hal III TW 2 Dan POK

Adapun Anggaran awal sampai dengan 30 Juni 2024 sebagai berikut:

URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2024	
	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Budidaya	187,900,000	187,900,000
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	190,150,000	190,150,000
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung Dan Bangunan	21,900,000	21,900,000
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan TUSI	8,450,000	8,450,000
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	25,500,000	25,500,000
Pendapatan Biaya Pendidikan	37,800,000	37,800,000
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	3,300,000	3,300,000
Pendapatan Jasa Lainnya		
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang lalu	0	0
JUMLAH PENDAPATAN	475,000,000	475,000,000
Belanja Pegawai	6,392,174,000	6,392,174,000
Belanja Barang	7,671,086,000	7,671,086,000
Belanja Modal	335,294,000	335,294,000
JUMLAH BELANJA	14,398,554,000	14,398,554,000

Realisasi anggaran per 30 Juni 2024 senilai Rp 8.969.548.040,00 dari total anggaran Rp.14.398.554.000,00 atau mencapai 62%. Rincian realisasi berdasarkan sumber belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	30 JUNI 2024		Realisasi %
	Anggaran	Realisasi	
Belanja			
Belanja Pegawai	6,392,174,000	5,191,362,477	81
Belanja Barang	7,671,086,000	3,769,185,563	49
Belanja Modal	335,294,000	0	0
Jumlah Belanja	14,398,554,000	8,960,548,040	62

REALISASI**PENDAPATAN****RP169.577.833****B.1 Pendapatan**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp169,577,833 atau mencapai 35.7% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp475.000.000. Pendapatan Satuan Kerja SUPM Waiheru Ambon terdiri dari Pendapatan Umum dan Fungsional dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan (dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024		
	ESTIMASI	Realisasi	%
Pendapatan Penjualan hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Budidaya	187,900,000	116,160,000	59.16
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	190,150,000	0	0
Pendapatan Dari Pemindahtanganan BMN Lainnya			
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	21,900,000	36,069,101	164.7
Pendapatan Penggunaan sarana dan prasarana sesuai TUSI	8,450,000	1,736,000	20.54
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	25,500,000	0	0
Pendapatan Biaya Pendidikan	37,800,000	9,400,000	24.87
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	3,300,000	3,780,000	114,55
Penerimaan Kembali Belanja pegawai TA yg Lalu	0	7,432,732	0
Jumlah	475,000,000	169,577,833	35.7

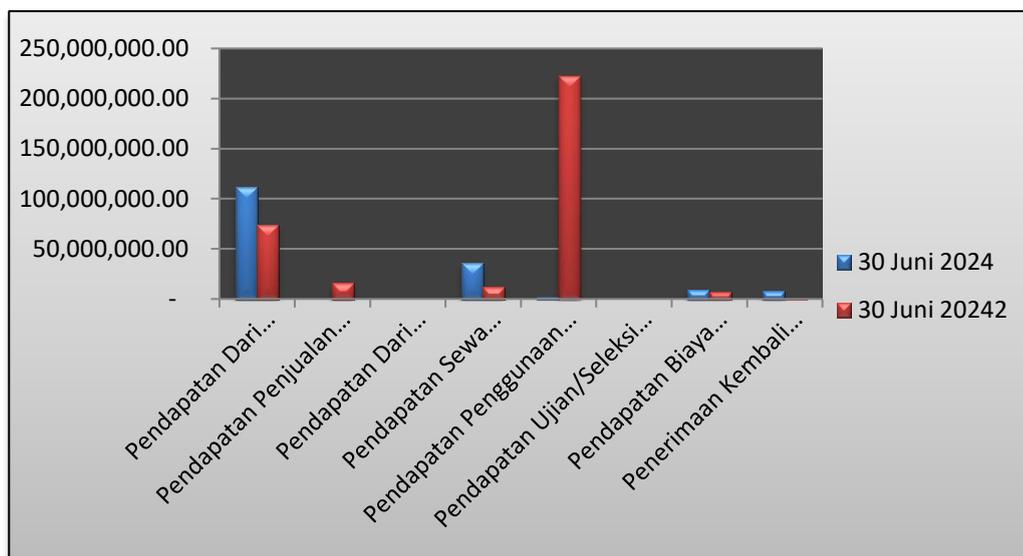
Adapun Rincian Realisasi Pendapatan Periode 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Penjualan hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Budidaya Berupa Setoran dari penjualan udang vaname, ikan nila dari TEFA Budidaya Senilai Rp.111.160.000,-
2. Pendapatan dari sewa tanah, gedung, dan Bangunan yaitu setoran sewa rumah dinas senilai Rp.36.069.101,-
3. Pendapatan dari sewa Cold Storage Yaitu penggunaan sarana dan prasarana sesuai TUSI senilai Rp.1.736.000,-
4. Pendapatan Biaya pendidikan berupa pembayaran uang semester senilai

Rp.9.400.000,-

- 5. Pendapatan Layanan Pendidikan dan /atau pelatihan Rp.3.780.000,-
- 6. Pendapatan dari penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu Rp.7.432.732,- berupa pendapatan sewa rumah dinas

Perbandingan Realisasi Pendapatan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023



REALISASI

BELANJA

RP8.960.548.040

B.2 Belanja

Realisasi Belanja SUPM Waiheru Ambon pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp8.960.548.040 atau 62% dari anggaran belanja sebesar Rp14.398.554.000.

Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	30 JUNI 2024			
	Anggaran	Realisasi	Realisasi diatas(Bawah) Anggaran	%
Belanja Pegawai	6,392,174,000	5,191,362,477	(1,200,811,523)	81
Belanja Barang	7,671,086,000	3,769,185,563	(3,901,900,437)	49
Belanja Modal	335,294,000	0	(335,294,000)	0
Total Belanja Kotor	14,398,554,000	8,960,548,040	(5,438,005,960)	62
<i>Pengembalian Belanja Pegawai</i>				
Jumlah	14,398,554,000	8,960,548,040	(5,438,005,960)	62

Perbandingan Realisasi Belanja
Per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 30 JUNI 2024	Realisasi 30 JUNI 2023	Naik (Turun)%
Belanja Pegawai	5,191,362,477	3,981,848,834	-23
Belanja Barang	3,769,185,563	4,045,176,696	7
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Kotor	8,960,548,040	8,027,025,530	-10
Jumlah	8,960,548,040	8,027,025,530	-10

BELANJA**PEGAWAI****RP5,187.749.177****B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.187.749.177 dan Rp7.371.886.000. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

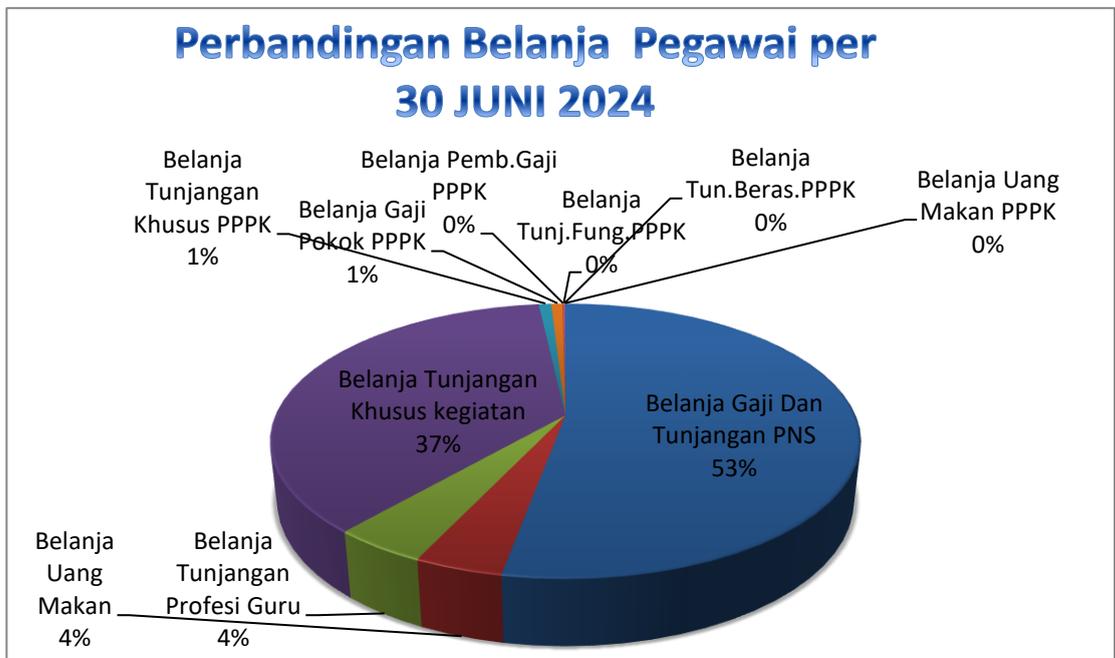
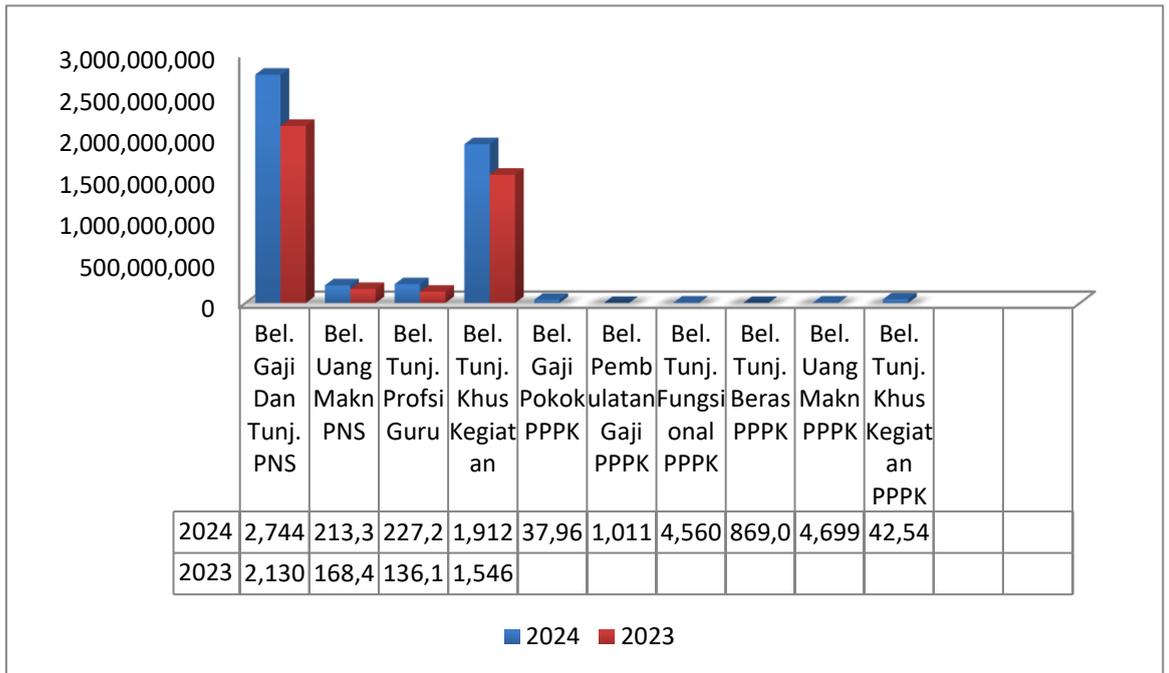
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 30 JUNI 2024	Realisasi 30 JUNI 2023	Naik (Turun)%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2,744,011,825	2,130,649,747	-22
Belanja Uang Makan	213,334,000	168,406,000	-22
Belanja Tunjangan Profesi Guru	227,253,200	136,147,000	-40
Belanja Tunjangan Khusus kegiatan	1,912,503,470	1,546,646,087	-19
Belanja Tunjangan Khusus kegiatan Kinerja PPPK	42,548,631		
Belanja Gaji Pokok PPPK	37,969,000		
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,011		
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4,560,000		
Belanja Tunjangan Beras PPPK	869,040		
Belanja Uang Makan PPPK	4,699,000		
Jumlah Belanja Kotor	5,187,749,177	3,981,849,834	-23
Pengembalian Belanja Pegawai			
Jumlah Belanja	5,187,749,177	3,981,849,834	-23

PERBANDINGAN REALISASI BELANJA PEGAWAI

30 JUNI 2024 DAN 30 JUNI 2023



B.4 Belanja Barang**BELANJA BARANG****RP3.769.185.563**

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.769.185.563 dan Rp4.045.176.696

**Perbandingan Realisasi Belanja Barang
30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023**

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 30 JUNI 2024	Realisasi 30 JUNI 2023	Naik(Turun) %
Belanja Keperluan Perkantoran	438,302,166	542,632,400	24
Belanja pengadaan Bahan Makan	419,963,434	402,643,650	-4
Belanja Pengiriman Surat dinas Pos Pusat	586,000	416,000	-29
Belanja Honor Operasional SATKER	37,760,000	62,420,000	-22
Belanja Bahan	210,231,186	137,079,500	-35
Belanja Honor output kegiatan	100,000	5,360,000	5260
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	932,499,277	0	-100
Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19		0	0
Belanja Barang Persediaan – Penanganan Pandemi Covid-19		0	0
Belanja Barang Persediaan lainnya	230,372,195	349,250,094	52
Belanja Langganan Listrik	208,372,633	265,061,252	27
Belanja Langganan Telepon			
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	29,980,679	49,345,500	65
Belanja Sewa	0	0	0
Belanja Jasa Profesi	62,795,000	86,790,000	38
Belanja Jasa Lainnya	0	0	0
Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	517,892,000	669,560,000	29
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	69,715,676	219,705,000	215
Belanja Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	64,800,000	64,650,000	0
Belanja Pemeliharaan Jaringan	32,798,600	4,048,500	-88
Belanja Perjalanan Biasa	507,633,717	173,728,000	-66
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,500,000	5,400,000	-2
Jumlah Belanja Bruto	3,769,185,583	4,045,176,696	7
Pengembalian Belanja Barang			
Jumlah Belanja Neto	3,769,185,583	4,045,176,696	7

BELANJA**BARANG****PENANGANAN****PANDEMI****COVID-19****RPO****B.4.1 Belanja Penanganan Pandemi COVID-19**

Satuan kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon untuk tahun Anggaran 2024 tidak mengalokasikan Anggaran untuk kegiatan dimaksud.

Akun	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
521241	Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi COVID-19			

B.5 Belanja Modal**BELANJA MODAL****RP335,294,000,-**

Untuk Tahun Anggaran 2024 sampai dengan 30 Juni 2024 SUPM Waiheru Ambon mendapatkan Belanja Modal Berupa tambahan Anggaran PNPB yaitu Belanja Penambahan Nilai Gedung Dan Bangunan. Namun sampai saat ini belum ada realisasi anggaran tersebut

**Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Juni 2024 dan Juni 2023**

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	335,294,000	209,762,000	-37
Jumlah Belanja Kotor	335,294,000	209,762,000	-37
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja Modal	335,294,000	209,762,000	-37

BELANJA MODAL B.5.1 Belanja Modal Tanah**TANAH RP00**

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp00 dan Rp00.

Perbandingan Realisasi Belanja Tanah**30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023**

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Jumlah Belanja Kotor			
Pengembalian Belanja Modal			
Jumlah Belanja Modal			

BELANJA MODAL B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**PERALATAN DAN****MESIN RP00**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 adalah sebesar Rp00, .

Perbandingan Realiasi Belanja Peralatan dan Mesin**30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023**

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Pengembangan Melalui KDP			
Pembelian Peralatan dan Mesin			
Pengembangan Nilai Aset			
Jumlah Belanja Kotor			
Pengembalian Belanja Modal			
Jumlah Belanja Modal			

BELANJA MODAL B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**GEDUNG DAN****BANGUNAN****RP00**

Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp00 dan Rp00.

**Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2024 dan 2023**

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Modal Gedung Dan Bangunan			
Penambahan Nilai Gedung Dan Bangunan			
Jumlah Belanja Kotor			
Pengembalian Belanja Modal			
Jumlah Belanja Modal			

BELANJA MODAL B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**JALAN, IRIGASI****DAN JARINGAN****RP00**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp00 dan Rp00.

**Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
TA 2024 dan 2023**

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Modal Jalan Dan Jembatan			
Belanja Modal Upah Tenaga kerja dan Honor Pengelola Teknis Dan Bangunan			
Jumlah Belanja Kotor			
Pengembalian Belanja Modal			
Jumlah Belanja Modal			

**BELANJA MODAL
LAINNYA RP00,-**

B.5.5. Belanja Modal lainnya

Belanja Modal Lainnya sampai dengan 30 Juni 2024 adalah Rp00,-

**BELANJA
BANTUAN
SOSIAL RP00,-**

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp00,- dan Rp00.- Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

**Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2024 dan 2023**

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Kelompok I			
Kelompok II			
Jumlah Belanja Kotor			
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal			

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**ASET LANCAR****RP216.537.480****C.1. Aset Lancar**

Jumlah Aset Lancar SUPM Waiheru Ambon TA 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp216.537.480 dan Rp148.537.983

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

KAS DI BENDAHARA**PENGELUARAN****RP72.000.000,00,-****C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada SUPM Waiheru Ambon Per Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp72.000.000 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2024 dan 2023**(dalam rupiah)*

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Uang Tunai di Brankas		0
Uang Di rekening Bank		
Saldo UP	72,000,000	
Kwitansi UP		
Saldo TUP		
Jumlah	72,000,000	0

KAS DI BENDAHARA**PENERIMAAN****RP00,-****C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan**

Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp00,- dan Rp00,- yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel II

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Uang Tunai		
Bank BRI No Rek.000101001542306 BPN 061 SUPM		
Jumlah		

Rincian Pendapatan Yang belum disetorkan Pada periode Pelaporan:

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Pengembalian TUKIN Pegawai		
Biaya pendaftaran Taruna Baru		
Kurang bayar Sewa Rumah Dinas		
Jumlah		

C.1.3 .Kas Lainnya dan Setara Kas

Rp7,454,167

Rincian Kas Lainnya Dan Setara Kas Per 30 Juni 2024 Merupakan Pajak TUP dan UP bulan Juni yang disetorkan pada Bulan Juli 2024 dengan rincian Sebagai berikut:

- 1.PPh Pembayaran honor narasumber inhouse training platform Merdeka senilai Rp50,000,-
- 2.PPh Pengadaan kebutuhan pokok pegawai Tahun 2024 senilai Rp226,950,-
- 3.PPh Pembayaran honor pengawas Inhouse training Platform Merdeka Senilai Rp25,000,-
- 4.PPh Pembelian Keperluan PPID senilai Rp33,459,-
- 5.PPh Pengadaan keperluan Pokok Pegawai Tahun 2024 senilai Rp1,664,300,-
- 6.PPh Kegiatan Sertifikasi cara pembuatan pakan ikan yang baik Senilai Rp69,932,-
- 7.PPh Cara Budidaya ikan yang baik senilai Rp70,946,-

- 8.PPh Kegiatan sertifikasi HACCP senilai Rp83,108
- 9.PPh Biaya Operasional Kegiatan Praktik Akhir senilai Rp54,054,-
- 10.PPh Pembelian estetika keperluan perkantoran senilai Rp204,149
- 11.PPh Pengadaan Pakaian Satpam Tahun 2024 senilai Rp87,000,-
- 12.PPh Kegiatan sertifikasi HACCP senilai Rp609,459,-
- 13.PPh Sertifikasi cara pembuatan pakan ikan yang baik senilai Rp512,838,-
- 14.PPh Cara Budidaya Ikan yang Baik senilai Rp520,720,-
- 15.PPh Biaya Operasional Kegiatan Praktek Akhir Poltek KP Maluku SenilaiRp396,396,-
- 16.PPh Pembelian Estetika Perkantoran Senilai Rp1,497,090,-
- 17.PPh Pengadaan Pakaian Satpam SUPM Waiheru Ambon senilai Rp638,000,-

Tabel III

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	7,454,167	
Kas lainnya di Bendahara Penerimaan		
Kas Lainnya dari Hibah		
Jumlah	7,454,167	

PIUTANG PNBP**RP00****C.1.4. Piutang PNBP**

Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp00,- dan Rp00,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV**Rincian Piutang PNBP TA 2024 dan 2023***(dalam rupiah)*

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Piutang PNBP		
Piutang Lainnya		
Jumlah		

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

BAGIAN LANCAR**TAGIHAN TUNTUTAN****PERBENDAHARAAN/****TUNTUTAN GANTI****RUGI (TP/TGR)****RP00,-****C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2024 dan Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp00,- dan Rp00,-.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V**Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2024 dan 2023***(dalam rupiah)*

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1.			
2.			
3.			
	Jumlah		

BAGIAN LANCAR
TAGIHAN
PENJUALAN
ANGSURAN
RP00,-

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp00,- dan Rp00,-

Bagian Lancar Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian Bagian Lancar TPA untuk masing-masing Satker disajikan sebagai berikut:

Tabel VI

Rincian Bagian Lancar TPA TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1.			
2.			
3.			
	Jumlah		

**PENYISIHAN
PIUTANG TIDAK
TERTAGIH –
PIUTANG LANCAR
Rp00,-**

C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lancar

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih SUPM Waiheru Ambon Per 30 Juni 2024 adalah tidak ada.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel VII

**Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk.
Pendek**

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar			
Kurang Lancar			
Diragukan			
Macet			
Jumlah			
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar			
Kurang Lancar			
Diragukan			
Macet			
Jumlah			
Bagian Lancar TPA			
Lancar			
Kurang Lancar			
Diragukan			
Macet			
Jumlah			
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih			

**BELANJA DIBAYAR
DI MUKA
Rp00,-**

C.1.8. Belanja Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp00,- dan Rp00,-

Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Beban Dibayar di Muka SUPM Waiheru Ambon per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel VIII

Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2024 dan 2023*(dalam rupiah)*

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pembayaran Internet		
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin		
Pembayaran Sewa Gedung Kantor		
Jumlah		

**PENDAPATAN YANG
MASIH HARUS
DITERIMA RP00,-**

C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima SUPM Waiheru Ambon per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp00,- dan Rp00,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IX

**Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
TA 2024 dan 2023**

(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2024	Tahun 2023
Pengembalian Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		
Pendapatan Jasa Pelatihan		
Pendapatan Jasa layanan pendidikan		
Jumlah		

**PERSEDIAAN
RP128.344.552,00**

C.1.10. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 30 Juni 2024 dan Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp128.344.552 dan Rp136,200,281 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel X
Rincian Persediaan TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Persediaan	Tahun 2024	Tahun 2023
Barang Konsumsi	80,229,048	24,118,192
Bahan untuk Pemeliharaan	0	
Suku Cadang	0	
Hewan/Tanaman untuk diserahkan kepada Masyarakat		
Bahan Baku	20,951,504	74,624,015
Persediaan lainnya	27,164,000	37,458,074
Jumlah	128,344,552	136,200,281

Semua jenis Persediaan pada Tanggal pelaporan dalam kondisi baik.

ASET TETAP

RP43.551.574.314,00

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap SUPM Waiheru Ambon per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp43.551.574,314 dan Rp45.980.940.338.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada SUPM Waiheru Ambon berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

TANAH

C.2.1. Tanah

RP13.703.592.500,00

Tanah yang dimiliki oleh SUPM Waiheru Ambon per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp13.703.592.500 dan Rp13.703.592.500

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel XI
Rincian Mutasi Tanah

(dalam rupiah)

Saldo awal 31 Desember 2023	
Nilai	13,703,592,500
AKUMULASI PENYUSUTAN	
Saldo Awal 31 Desember 2023	13,703,592,500
Beban Penyusutan	0
Koreksi	0
Total	0
Nilai Buku per 30 Juni 2024	13,703,592,500

Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel XII
Rincian Tanah TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	55.000m ²	Jln.Laksdya Leo Wattimena KM.16 Waiheru	5.723.703.000
2	40.050m ²	Kairatu	7.973.889.500
3			
4			
Jumlah			13.703.592.500

**PERALATAN DAN
MESIN
RP17.530.415.832,00**

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin SUPM Waiheru Ambon per 30 Juni 2024 dan Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp17.530.415.832 dan Rp25.999.922.430.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel XIII

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Saldo awal 31 Desember 2023	
Nilai	17,530,415,832
AKUMULASI PENYUSUTAN	
Saldo Awal	(24,505,677,110)
Beban Penyusutan	
Koreksi	
Total	(16,697,335,153)
Nilai Buku Per 30 Juni 2024	833,080,679

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutannya per 30 Juni 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

**GEDUNG DAN
BANGUNAN
RP34.352.254.037,00**

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 dan Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp34.352.254.037 dan Rp34.969.785.813

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel XIV

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2023

(dalam rupiah)

Saldo 31 Desember 2023	
Nilai	34,352,254,037
AKUMULASI PENYUSUTAN	
Saldo Awal	(7,345,959,286)
Mutasi Penyusutan	(837,963,891)
Koreksi	
Total	(7,983,923,177)
Nilai Buku Per 30 Juni 2024	26,368,330,860

JALAN DAN**JEMBATAN****RP1,833,600,519,00**

Rincian Gedung dan Bangunan beserta Akumulasi Penyusutannya per 30 Juni 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan

C.2.4. Jalan Dan Jembatan

Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.833.600.519 dan Rp3.048.672.453 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel XV**Rincian Mutasi Jalan dan Jembatan***(dalam rupiah)*

Saldo 31 Desember 2023	
Nilai	1,833,600,519
AKUMULASI PENYUSUTAN	
Saldo Awal	(512,637,275)
Mutasi penyusutan	(16,272,743)
Koreksi	
Total	(528,910,018)
Nilai Buku	1,304,690,501

Rincian Aset Tetap Jalan dan Jembatan beserta Akumulasi Penyusutannya per 30 Juni 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

IRIGASI**RP394,283,634,00****C.2.5. Irigasi**

Irigasi per 30 Juni 2024 Rp394.283.634 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel XVI**Irigasi***(dalam rupiah)*

Saldo Per 31 Desember 2023	
Nilai	394,283,634
AKUMULASI PENYUSUTAN	
Saldo Awal	(302,599,636)
Mutasi Penyusutan	(8,010,288)
Koreksi	
Total	(310,609,924)
Nilai Buku	83,673,710

JARINGAN**RP820,788,300,00****C.2.6. Jaringan**

Jaringan per 30 Juni 2024 Rp820.788.300 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel XVII**Jaringan***(dalam rupiah)*

Saldo 31 Desember 2023	
Nilai	820,788,300
AKUMULASI PENYUSUTAN	
Saldo Awal	602,194,509)
Mutasi Penyusutan	(4,436,547)
Koreksi	
Total	(606,631,056)
Nilai Buku	214,157,244

ASET TETAP**LAINNYA****RP1.548.798.822****C.2.7. Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.548.798.822 dan Rp1.604.132.822 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel XVIII**Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya***(dalam rupiah)*

Saldo 31 Desember 2023	
Nilai	1,548,798,822
AKUMULASI PENYUSUTAN	
Saldo Awal	(504,750,002)
Mutasi Penyusutan	0
Koreksi	0
Total	(504,750,002)
Nilai Buku	1,044,048,820

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

**KONSTRUKSI
DALAM
PENGERJAAN RP00,-**

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp00,- dan Rp00,-

**AKUMULASI
PENYUSUTAN ASET
TETAP
RP(26,632,159,330,00)**

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(26,632,159,330) dan Rp33,773,717,818

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024.

Tabel XIX

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	17,630,415,832	(16,697,335,153)	833,080,679
2.	Gedung dan Bangunan	34,352,254,037	(7,983,923,177)	26,368,330,860
3.	Jalan dan Jembatan	1,833,600,519	(528,910,018)	1,304,690,501
4.	Irigasi	394,283,634	(310,609,924)	83,673,710
5.	Jaringan	820,788,300	(606,631,056)	214,157,244
6.	Aset tetap Lainnya	1,548,798,822	(504,750,002)	1,044,048,820
	Jumlah	56,580,141,144	(26,632,159,330)	29,847,981,883

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

**PIUTANG JANGKA
PANJANG
RP00,-**

C.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang SUPM Waiheru Ambon per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp00,-.

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

**PIUTANG TAGIHAN
TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN/
TUNTUTAN GANTI
RUGI (TP/TGR)
Rp00,-**

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) SUPM Waiheru Ambon per 30 Juni 2024 dan Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp00,- dan Rp00,-

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Tabel XX

Rincian Piutang Tagihan TP/TGR TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
	Jumlah		

**TAGIHAN
PENJUALAN
ANGSURAN Rp00,-**

C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp00,- dan Rp00,- berupa penjualan aset tetap yang pembayarannya diselesaikan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian TPA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Tabel XXI**Rincian Piutang TPA TA 2024 dan 20223(dalam rupiah)**

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
	Jumlah		

**PENYISIHAN
PIUTANG TIDAK
TERTAGIH –
PIUTANG JANGKA
PANJANG RP00,-**

C.3.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2024 dan Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp00,- dan Rp00,-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut.

Tabel XXII

**Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Panjang
TA 2024**

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar			
Kurang Lancar			
Diragukan			
Macet			
Jumlah			
Tagihan TPA			
Lancar			
Kurang Lancar			
Diragukan			
Macet			
Jumlah			
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih			

ASET LAINNYA**RP00,-****C.4. Aset Lainnya**

Saldo Aset Lainnya per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp00,- dan Rp00,-

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Kantor Akuntansi Bogor terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

ASET TAK**BERWUJUD****RP00,-****C.4.1. Aset Tak Berwujud**

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp00,- dan Rp00,-

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Tabel XXIII**Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud***(dalam rupiah)*

Saldo Nilai Perolehan 01 Januari 2023	
Mutasi tambah:	
Pembelian	
Saldo Per 30 Juni 2024	
Amortisasi s.d. 30 Juni 2024	
Nilai Buku Per 30 Juni 2023	

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel XXIV**Rincian Aset Tak Berwujud TA 2024***(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Nilai
1.		
2.		
	Jumlah	

ASET LAIN-LAIN**RP8,524,840,598****C.4.2. Aset Lain-lain**

Aset Lain-lain per 30 Juni 2024 dan Juni 2023 adalah Rp8.524.840.598,00- dan Rp22.642.444,00,- Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Satker SUPM Waiheru Ambon. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel XXV**Rincian Mutasi Aset Lain-lain***(dalam rupiah)*

Saldo Nilai Perolehan 01 Januari 2024	Rp8,524,840,598
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	
Mutasi Kurang:	
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	
Penghapusan BMN	
Saldo Per 30 Juni 2024	
Amortisasi s.d. 30 Juni 2024	
Nilai Buku Per 30 Juni 2024	Rp8,524,840,598

AKUMULASI**PENYUSUTAN DAN****AMORTISASI ASET****LAINNYA****RP(8,085,845,724)****C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2024 dan Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(8,085,845,724) dan (Rp11.107.613). Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel XXVI**Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya****TA 2023***(dalam rupiah)*

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud			
1.	Software			
	Jumlah			
B.	Aset Lain-lain			
	Jumlah			
	Total			

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

**KEWAJIBAN JANGKA
PENDEK
RP602.861.727**

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2024 dan Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp602.861.727 dan Rp10.742.600.

**UANG MUKA DARI
KPPN RP72,000,000**

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2024 dan Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp72.000.000,- dan Rp0,- merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

**UTANG KEPADA
PIHAK KETIGA
RP305.775.589**

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan Juni 2023 masing-masing sebesar Rp305.775.589 dan Rp10.742.600,- Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup SUPM Waiheru Ambon per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel XXVII

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	305,775,589
2.		
3.		

Total	305,775,589
--------------	-------------

Utang Kepada Pihak ketiga dengan total Rp305,775,589 merupakan utang tahun 2023 senilai Rp10,742,600 dan utang per 30 Juni 2024 senilai Rp295,328,989 yang terdiri dari belanja pegawai Rp282,,328,989 dan Belanja Barang senilai Rp12,704,000 yang akan diSP2D pada 1 Juli 2024

**UTANG YANG BELUM
DITAGIHKAN
RP217,631,971,00**

UTANG YANG BELUM DITAGIHKAN

Utang yang belum ditagihkan yang berakhir pada 30 Juni 2024 senilai Rp217,631,971,00 berupa :

- 1.Adanya kwitansi UP yang belum di SPM kan senilai Rp71,937,983
- 2.Adanya BAST bahan makan yang sudah dicatat dibulan Juni tetapi SPMnya diajukan Pada Bulan Juli

**PENDAPATAN
DITERIMA DI MUKA
RP00,-**

C.5.3. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2024 dan Juni 2023 adalah sebesar Rp00,- dan Rp00,-

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBK. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel XXVIII

Rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
Jumlah	

**BEBAN YANG MASIH
HARUS DIBAYAR
RP00,-**

C.5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2024 dan Juni 2023 adalah sebesar Rp00,- dan Rp00,- merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum

diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel XXIX

Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	2024	2023
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar		
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar		
Jumlah		

EKUITAS

RP43.599.077.573

C.7 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2024 dan Juni 2023 adalah masing- masing sebesar Rp43.599.077.573 dan Rp45.690.183.583. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**PENDAPATAN****PNBP****RP165.716.094****D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan Juni 2023 adalah sebesar Rp165.716.094 dan Rp332.949.860. Pendapatan tersebut terdiri dari:

**Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
TA 2024 dan 2023**

(dalam Rupiah)

Uraian	REALISASI			
	30 Juni 2024	30 Juni 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
Pendapatan Penjualan hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Budidaya	111,160,000	74,075,000	37,085,000	-33
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	16,088,000	(16,088,000)	0
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	36,069,101	11,748,870	24,320,231	-67
Pendapatan Penggunaan sarana dan prasarana sesuai TUSI	1,736,000	222,510,000	(20,774,000)	12717
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan				
Pendapatan Biaya Pendidikan	9,400,000	7,000,000	2,400,000	-26
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	3,780,000	0	3,780,000	-100
Pendapatan Pemindahtanganan BMN	0	0	0	0
Penerimaan Kembali Belanja pegawai TA yg Lalu	0	0	0	0
Jumlah	165,716,094	332,949,860	163,372,027	96

BEBAN PEGAWAI
RP5.470.078.166

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.470.078.166 dan Rp4.251.738.021. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Gaji Pokok Dan Tunjangan PNS	3,0004,187,003	2,400,547,934	-21
Beban Uang Makan PNS	213,334,000	168,406,000	-21
Beban Tunjangan Profesi Guru	227,253,200	136,147,000	-40
Beban Tunjangan Khusus Kegiatan	1,912,503,470	1,546,646,087	-19
Beban Gaji Pokok PPPK	37,969,000		-100
Beban Pembulatan Gaji PPPK	1,011		-100
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	4,560,000		-100
Beban Tunjangan Beras PPPK	869,040		-100
Beban Uang Makan PPPK	4,699,000		-100
Beban Tunjangan Khusus PPPK	42,548,631		-100
Jumlah Beban	5,470,078,166	4,251,738,021	-22

**BEBAN
PERSEDIAAN
Rp220,195,527,00**

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp220,195,527,00 dan Rp480.817.698. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Juni 2024 dan Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan JUNI 2024 dan JUNI 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Persediaan Konsumsi	123,902,946	133,380,212	46
Beban untuk Pemeliharaan			
Beban Suku Cadang			
Beban Bahan Baku			
Beban Persediaan Bahan Baku	54,892,946	234,311,530	327
Beban Persediaan Lainnya	41,400,000	113,125,956	173
Beban persediaan bahan Untuk pemeliharaan			
Jumlah Beban	220,195,527	480,817,698	118

**BEBAN BARANG
DAN JASA
Rp2,520,073,663**

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2023 dan Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.520.073.663 dan Rp2.823.540.102. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Penurunan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya penghematan atas beban-beban operasional perkantoran, penurunan pengiriman surat karena sudah disampaikan secara *online*.

Rincian Beban Barang dan Jasa
JUNI 2024 dan JUNI 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Keperluan Perkantoran	444,301,566	542,632,400	22
Beban Pengadaan Bahan Makan	565,577,422	1,066,351,450	89
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	586,000	416,000	-29
Beban Honor Operasional Satker	37,760,000	62,420,000	65
Beban Bahan	226,511,186	137,079,500	-39
Beban Barang Non Operasional Lainnya	934,704,277	343,389,000	-63
Beban Honor Output Kegiatan	100,000	5,360,000	5260
Beban Langganan Listrik	209,247,233	265,061,252	27
Beban langganan Daya dan Jasa Lainnya	36,090,979	49,345,500	37
Beban Jasa Profesi	65,195,000	86,780,000	33
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		669,560,000	-100
Beban Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin		219,705,000	-100
Beban Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan		64,650,000	-100
Beban Pemeliharaan jaringan		4,048,500	-100
Beban Perjalanan Biasa		173,728,000	-100
Beban perjalanan dinas dalam kota		5,400,000	-100
Jumlah Beban	2,520,073,663	2.823.540.102	

BEBAN
PEMELIHARAAN
RP711,130,876,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Juni 2024 dan Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp711,130,876 dan Rp966,665,750. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama serta pengeluaran untuk asuransi atas gedung dan bangunan. Rincian beban pemeliharaan untuk Juni 2024 dan Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan JUNI 2023 dan JUNI 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	517,892,000	669,560,000	29
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	77,338,676	219,705,000	184
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	64,800,000	64,650,000	0
Beban Pemeliharaan Jaringan	33,384,600	4,048,500	-88
Beban Persediaan Bahan Untuk pemeliharaan	17,715,600		
Beban persediaan Suku cadang			
Jumlah Beban	711,130,876	966,665,750	36

**BEBAN
PERJALANAN
DINAS
Rp555,777.400**

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun untuk Desember 2023 dan Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp555.777.400 dan Rp227.898.500. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Juni 2024 dan Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	549,977,400	173,728,000	-68
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,800,000	5,400,000.	-7
Jumlah Beban	555,777,400	227,898,500	-59

**BEBAN
BARANG
UNTUK
DISERAHKAN
KEPADA
MASYARAKAT
Rp00,-**

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Juni 2024 dan Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp00,- dan Rp00,- Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Satker memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat dan pengusaha UMKM berupa bantuan peralatan dan perlengkapan untuk penerapan akuntansi dan pelaporan. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat JUNI 2024 dan JUNI 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	JUNI 2024	JUNI 2023	%
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda			
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda			

BEBAN**BANTUAN****SOSIAL****RP00,-****D.8 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial untuk Juni 2024 dan Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp00,- dan Rp00,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Juni 2024 dan Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial
JUNI 2024 dan JUNI 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Juni 2024	Juni 2023	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial			
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial			
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial			
Jumlah Beban			

BEBAN**PENYUSUTAN****DAN****AMORTISASI****RP0****D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Juni 2024 dan Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp00,- dan Rp00,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Juni 2024 dan Juni 2023 adalah sebagai berikut:

**RINCIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
JUNI 2024 DAN JUNI 2023**

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin			
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan			
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan			
Beban Penyusutan irigasi			
Beban Penyusutan Jaringan			
Beban Penyusutan asset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah			
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi			

BEBAN

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

PENYISIHAN

PIUTANG

TIDAK

TERTAGIH

RP00,-

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode Juni 2024 dan Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp00,- dan Rp00,- Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Juni 2024 dan Juni 2023 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
JUNI 2024 dan Juni 2023**

(dalam Rupiah)

Uraian	Juni 2024	Juni 2023	%
Beban Penyusutan Piutang PNBK			
Beban Penyusutan Piutang Lainnya			
Jumlah Beban			

JUMLAH

**SURPLUS/DEFISIT
DARI KEGIATAN
NON OPERASIONAL
RP(121,348,900)**

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk Juni 2024 dan Juni 2023 adalah sebagai berikut:

**Rincian Kegiatan Non Operasional
Juni 2024 dan Juni 2023**

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(10,294,263,008)	(9.451.060.295)	(843,202,713)	8.922
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non lancar	(116,181,532)	(66,945,809)	(49,235,723)	73.546
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0			0
Beban pelepasan Aset Non Lancar	116,181,532	66,945,809	49,235,723	73.546
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional lainnya	(5,167,368)	191,123,506	(196,290,874)	102.704
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya	(5,167,368)	191,123,506	(196,290,874)	102.704
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(121,348,900)	124,177,697	245,526,597	197.722
Surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa	(1,415,611,908)	(9,326,882,598)	(1,088,729,310)	11.673
SURPLUS/DEFISIT LO	(1,415,611,908)	(9,326,882,598)	(1,088,729,310)	11.673

POS LUAR D.12 Pos Luar Biasa**BIASA****NIHIL**

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Juni Tahun 2024 dan 2023.

Rincian Pos Luar Biasa Untuk Juni 2024 dan Juni 2023

Uraian	2024	2023	%
Pendapatan PNB			
Beban Perjalanan Dinas			
Beban Persediaan			
JUMLAH			

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**EKUITAS AWAL****RP45,690,183,583****E.1. Ekuitas Awal**

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp45.690.183.583 dan Rp47.191,381,538

SURPLUS/DEFISIT**LO****RP(10,410,444,540)****E.2. Surplus/Defisit-LO**

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah defisit sebesar Rp(10,410,444,540) dan (Rp9,326,882,598). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

PENYESUAIAN**NILAI ASET****RP0****E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset**

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan Juni 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

KOREKSI ATAS**REKLASIFIKASI****RP0****E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0

SELISIH**REVALUASI****ASET TETAP****RP0****E.4.3. Selisih Revaluasi Aset tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0

KOREKSI NILAI**ASET NON****REVALUASI****(RP462,914,010}****E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi**

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar (Rp462,914,010) dan (Rp100,940,084)

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel XXVIII
Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	
Gedung dan Bangunan	
Jumlah	

KOREKSI LAIN-LAIN RPO

E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang.

Rincian Koreksi Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel XXIX
Rincian Koreksi Lain-lain Per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

Jenis Koreksi	Jumlah
Koreksi Beban	
Koreksi Pendapatan	
Koreksi Piutang	
Koreksi Kewajiban	
Koreksi Hibah	
Jumlah	

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS RP8,787,356,907

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp8.787.356.907 dan Rp7.694.971.394.

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih

entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel XXX
Transaksi Antar Entitas per Juni 2024

Jenis Persediaan	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	
Ditagihkan ke Entitas Lain	
Transfer Masuk	
Transfer Keluar	
Pengesahan Hibah Langsung	
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	
Jumlah	

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 30 Juni 2024, DDEL sebesar Rp0,00 sedangkan DKEL sebesar Rp0,00

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Sampai akhir 30 Juni 2024 Transfer Masuk dan Transfer Keluar pada SUPM Waiheru Ambon tidak ada

Tabel XXXI
Transfer Masuk per Juni 2024

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.			
2.			
Jumlah			

Tabel XXXII
Transfer Keluar per Juni 2024

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.			
2.			
Jumlah			

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp0,00 .

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 adalah Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel XXXIII
Pengesahan Hibah Langsung per Juni 2024

No.	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
1.			
2.			
Total Pengesahan			
Pengesahan Pengembalian Hibah			
Jumlah			

EKUITAS AKHIR

RP43.604.244.941

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 dan Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp43.604.244.941 dan Rp45.458.530.250.

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca**

SUPM Waiheru Ambon telah menindak lanjuti temuan BPK terkait tugas belajar pegawai SUPM Waiheru Ambon TA 2023 dan sudah disetorkan ke kas negara pada Tahun Anggaran 2024 senilai Rp12,600,100,-.

F.1 Pengungkapan Lain-lain

Berdasarkan Perubahan Kelima Puluh atas Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor: KEP.79/ MEN/KU.611/2019 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA KANTOR DAERAH (UNIT PELAKSANA TEKNIS) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Tanggal 17 Juli 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah membayar (SPM) dan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor; SK.07/BRSDM.SUPM-WHR/KU.111/1/2020 tanggal 02 Januari 2023 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon Tahun Anggaran 2023:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Abdul A Usemahu,S.St.Pi,M.S.T.Pi
Pejabat Pembuat Komitmen	: Ariati Wagola,S.Pi
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Naiboki Salampessy,S.Pi,M.Si
Bendahara Pengeluaran	: Irma Sampulawa
Bendahara Penerimaan	: Irjan Renwarin,S.Pi